

SINERGITAS INSTITUSI SIPIL DAN MILITER DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN KESEHATAN DI BANDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANAKUSUMA

Ono Rahayu Hadi¹, Taufik Hidayat², Windy Dermawan³

¹Program Studi Keamanan, Universitas Padjadjaran, Bandung

²Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung

³Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung

email korespondensi: onorahayu80@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena ancaman nir militer yang saat ini tengah menjadi perhatian seluruh pihak di dunia termasuk di Indonesia salah satunya adalah penyebaran penyakit menular sebagai bagian dari ancaman keamanan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh pesatnya perkembangan transportasi sehingga setiap negara di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada upaya peningkatan keamanan kesehatan di salah satu pintu masuk negara yaitu Bandara Internasional Halim Perdanakusuma. Terdapat dua instansi di Bandara Halim Perdanakusuma yang dapat mencegah penyakit menular, yaitu RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sinergitas RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dalam menghadapi ancaman keamanan kesehatan dari adanya potensi penyakit menular. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah informan, studi dokumentasi dan observasi. Riset ini menunjukkan bahwa sinergitas RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dalam menghadapi ancaman kesehatan dari penyebaran penyakit menular sudah terjalin namun belum berjalan optimal. Sinergitas ini dilihat dari adanya pembagian tugas pada saat terdapat pengiriman anggota TNI untuk melaksanakan misi PBB ke luar negeri, sementara terkait pemeriksaan bagi sipil, baik penerbangan komersial atau *charter* masih belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Sinergitas, Hubungan Sipil-Militer, Keamanan Kesehatan, RSAU dr. Esnawan Antariksa, Kantor Kesehatan Pelabuhan.

PENDAHULUAN

Salah satu bahaya ancaman nir militer yang saat ini tengah menjadi perhatian seluruh pihak di dunia termasuk di Indonesia adalah ancaman keamanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan saat ini perkembangan penyakit yang berpotensi wabah atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) semakin meningkat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini, perubahan iklim dan peningkatan resistensi anti-mikroba telah mendorong peningkatan munculnya *new-emerging diseases* dan *re-emerging diseases* yang berpotensi pandemik dengan karakteristik risiko kematian yang tinggikan penyebaran yang sangat cepat. Sejak *outbreak* wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) di kawasan Asia pada tahun 2003, ancaman keamanan kesehatan global terus menunjukkan kecenderungan peningkatan antara lain terjadinya *outbreak* flu burung/*avian influenza* (H5N1) tahun 2004, flu babi/*swine influenza* (H1N1) tahun 2009, *Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus* (MERS-CoV) tahun 2012-2013, Ebola tahun 2014, dan Zika tahun 2015. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa *outbreak* wabah Ebola di Guinea, Liberia dan Sierra Leone pada tahun 2014 mengakibatkan pertumbuhan negatif perekonomian ketiga negara tersebut lebih dari setengah pertumbuhan ekonomi sebelum *outbreak*. Kerugian ekonomi akibat *outbreak* di kawasan Afrika secara keseluruhan mencapai USD 30 Milyar. Indonesia pun pernah mengalaminya saat menghadapi *outbreak* flu burung yang menanggung beban ekonomi sampai Rp. 4 Trilyun pada 2004 - 2006, serta penurunan perdagangan dan pariwisata. Keamanan kesehatan global mengakibatkan dampak kerusakan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas negara serta perdagangan barang dan jasa, pariwisata, dan stabilitas demografi.¹

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) baru saja merilis 10 ancaman kesehatan global terbesar pada 2019. Jika ancaman ini tidak segera diatasi maka jutaan nyawa di seluruh dunia akan ada dalam bahaya. 10 ancaman kesehatan global terbesar pada 2019 menurut WHO diantaranya adalah: (1) Menolak vaksin. (2) Resistansi obat. (3) Polusi udara dan perubahan iklim. (4) Pandemi flu global. (5) Krisis di tempat rentan. (6) Ancaman patogen seperti Ebola. (7) Penyakit tidak menular. (8) Demam

Berdarah *Dengue* (DBD). (9) Layanan kesehatan yang lemah. (10) HIV.² Berdasarkan pada data di atas maka dapat dilihat bahwa ancaman keamanan kesehatan terus mengalami perkembangan dan dapat menjadi ancaman yang serius bagi sistem kesehatan nasional serta dapat mengakibatkan kerusakan besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat suatu negara termasuk Indonesia.

Salah satu penyebab cepatnya proses penyebaran suatu wabah penyakit menjadi ancaman keamanan kesehatan global bisa jadi dikarenakan oleh pesatnya perkembangan transportasi yang terjadi saat ini. Dimana dengan kemajuan teknologi transportasi serta kemudahan yang terjadi saat ini, orang dapat dengan mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu negara ataupun keluar negara dan hal tersebut bisa saja menyebabkan suatu wabah penyakit yang menular secara sengaja atau tidak sengaja terbawa ke wilayah atau negara lain. Untuk mengantisipasi ancaman keamanan kesehatan tersebut, setiap negara termasuk Indonesia harus memperketat pengamanan kesehatan pada pintu masuk wilayah negara salah satunya adalah bandara. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini transportasi udara masih menjadi pilihan utama masyarakat dunia untuk bepergian baik antar pulau ataupun antar negara dengan alasan karena transportasi udara memiliki keunggulan dalam kecepatan bila dibandingkan modal transportasi lainnya, dan hal tersebut tentu saja membuat orang yang masuk atau keluar melalui bandara akan lebih banyak bila dibandingkan melalui pintu masuk wilayah negara lainnya.

Salah satu contoh serangan ancaman kesehatan yang penyebarannya didukung oleh transportasi udara atau penerbangan, namun dilakukan secara tidak disengaja adalah serangan flu burung H1N1 yang terjadi pada tahun 2009 yang merenggut 300 ribu nyawa dari seluruh dunia dan kejadian infeksi saluran pernapasan atau SARS pada tahun 2003 yang menelan lebih dari 1000 korban dan menginfeksi setidaknya 37 negara. Untuk mengetahui dan membuktikan peran penerbangan dalam penyebaran wabah penyakit tersebut, peneliti dari teknik sipil dan lingkungan di Massachusetts Institute of Technology di AS melakukan penelitian dengan menggunakan model matematika untuk menentukan bandara di AS yang paling membantu penyebaran penyakit menular. Hasilnya diketahui bahwa bandara John F Kennedy International Airport di New York ada di

posisi pertama, diikuti bandara LAX di Los Angeles, dan Honolulu International Airport di Hawaii yang dinilai paling membantu penyebaran penyakit ke seluruh dunia.³

Sedangkan di Indonesia, ancaman kesehatan melalui bandara secara tidak sengaja pernah terjadi di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Fernandes dkk. (2016), dalam jurnalnya yang berjudul *Prevention of Communicable Disease Spread in Soekarno-Hatta International Airport: An Evaluation Report in 2016* mengungkapkan bahwa pada 2016 ada 39.088 kedatangan internasional dan 40.925 keberangkatan yang membawa 13.715.505 penumpang ke dan dari Indonesia. Diantara semua kedatangan, 3117 berasal dari negara-negara yang menerapkan meningitis dan endemik MERS-CoV, 983 penerbangan berasal dari endemik H7N9, 9 penerbangan berasal dari MERS-CoV, dan 3752 penerbangan adalah negara endemik Ebola. Staf Port Health menggunakan pemindai termal untuk menyaring semua penumpang yang datang dari negara-negara endemik dan menerapkan pemeriksaan acak dari semua negara lain untuk menemukan penumpang dengan suhu tubuh yang timbul. Metode ini mampu menyaring satu penumpang dari negara endemik MERS-CoV, 2 penumpang dari negara endemik Ebola, dan satu dari negara endemik Zika dari total 1.510.632 penumpang.⁴

Adapun serangan terhadap keamanan kesehatan yang pernah terjadi secara sengaja oleh teroris, namun tidak dilakukan di bandara adalah serangan dengan menggunakan bioterorisme bakteri antraks. Penggunaan antraks sebagai agen bioterorisme menjadi berita besar ketika terjadi pengeboman WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Setelah serangan tersebut, terjadi kasus teror spora (sel) antraks yang disebarkan melalui amplop kepada para senator, jurnalis dan gedung-gedung surat kabar di Amerika Serikat. Kasus ini memakan korban lima orang tewas, 22 terluka. Sekitar 32.000 orang yang terkontaminasi spora antraks disarankan minum antibiotik dalam jangka waktu lama.⁵

Dengan adanya temuan tersebut, maka semua negara di dunia termasuk Indonesia harus memperketat pengamanan kesehatan di bandara. Salah satu bandara di Indonesia yang harus melaksanakan pengamanan kesehatan secara optimal adalah Bandara Halim Perdanakusuma. Hal tersebut dikarenakan Bandara Halim Perdanakusuma merupakan salah satu pangkalan

militer yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai bandara komersial sehingga Bandara Halim Perdanakusuma memiliki fungsi ganda yaitu sebagai bandara komersial serta sebagai obyek vital nasional yang harus selalu di jaga fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Sebagai pangkalan militer, Lanud Halim Perdanakusuma pada hakikatnya merupakan subsistem dari sistem pertahanan nasional yang mempunyai fungsi khusus yang terkait dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Lanud Halim Perdanakusuma juga berfungsi sebagai penunjang keperluan keamanan tingkat tinggi, seperti pengamanan tamu negara (VVIP/VIP), basis pengiriman logistik dalam jumlah besar serta *exit airport* bila sewaktu-waktu terjadi kekacauan nasional.

Dari awal berdirinya Lanud Halim Perdanakusuma sudah memiliki peran dan fungsi sebagai fasilitas atau alat pendukung utama bagi TNI Angkatan Udara dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Saat ini di Lanud Halim Perdanakusuma terdapat empat skadron udara operasional dan satu skadron pendukung. Keempat Skadron operasional tersebut adalah Skadron Udara 2 (mengoperasikan pesawat angkut ringan/ sedang jenis CN-235 dan CN-295), Skadron Udara 17 VVIP/VIP (mengoperasikan pesawat Boeing 737, Fokker F- 28, C-130 Hercules dan pesawat kepresidenan BBJ-2) dan Skadron 45 (mengoperasikan Helikopter VVIP/VIP). Sedangkan satu Skadron pendukung adalah Skadron Teknik (Skatek) 021 yang merupakan bengkel pemeliharaan pesawat tingkat ringan/ sedang. Di luar itu, masih ada satuan-satuan samping seperti dua batalyon Paskhas (Yon 461 dan Yon 467), satu Detasemen Pertahanan Udara 471 (Denhanud 471), Markas Kohanudnas, Markas Kosek Hanudnas I dan Markas Koopsau I. Dengan demikian, keberadaan wilayah Halim Perdanakusuma sejatinya tak ubahnya sebuah obyek vital nasional yang harus selalu di jaga fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Selain sebagai obyek vital yang memerlukan pengamanan khusus, saat ini di kompleks Trikora Halim Perdanakusuma juga terdapat beberapa fasilitas sosial, seperti RSAU dr. Esnawan Antariksa, masjid, sekolah, mess organik, kantor dan laboratorium psikologi penerbangan, serta perumahan prajurit aktif.

Dengan diberlakukannya Lanud Halim Perdanakusuma sebagai bandara komersial, maka ada banyak instansi yang bertanggung jawab dalam mendukung operasional bandara termasuk

dalam mendukung pengamanan kesehatan di bandara, satu diantaranya adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang bertugas dalam bidang pelayanan kesehatan bandara. Peran dan kedudukan KKP Kelas I Soekarno Hatta wilayah kerja Halim Perdanakusuma merupakan ujung tombak dalam mengantisipasi ancaman keamanan kesehatan di bandara. Namun, selain KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma, karena Bandara Halim Perdanakusuma merupakan pangkalan militer, maka terdapat Rumah Sakit milik TNI Angkatan Udara yaitu RSAU dr. Esnawan Antariksa yang pada dasarnya juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pengamanan kesehatan di Bandara Halim Perdanakusuma. Dengan adanya dua lembaga kesehatan di wilayah Bandara Halim Perdanakusuma, yaitu KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan adanya sinergitas yang baik antara dua lembaga tersebut sehingga masing-masing lembaga bisa saling melengkapi satu sama lain, yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan upaya dalam menjaga negara dari ancaman keamanan kesehatan di Bandara Halim Perdanakusuma.

LANDASAN TEORI

Keamanan Nasional

Keamanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melindungi serta menjaga kepentingan nasional dengan menggunakan berbagai kekuatan yang dimiliki diantaranya kekuatan politik, ekonomi dan militer dalam menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri (Darmono dkk, 2010: 9). Berdasarkan pada sifatnya terdapat dua bentuk ancaman yaitu pertama ancaman militer yang merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi. Kedua adalah ancaman nir militer atau dikenal juga sebagai ancaman asimetris, merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor nir militer. Kedua ancaman tersebut merupakan faktor yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal sedangkan ancaman nir militer dapat berupa ancaman yang memiliki dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,

teknologi (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015: 20).

Berakhirnya perang dingin membuka era untuk pengertian keamanan yang lebih komprehensif, pengertian keamanan lebih luas mencakup bermacam-macam instrumen dan sumber ancaman, bahkan tidak hanya terbatas pada kemakmuran negara tetapi hingga kesejahteraan individu atau manusia. Paska perang dingin berakhir pada awal 1990-an, konsep mengenai human security kembali mengemuka dan identifikasi United Nations Development Programme's (UNDP) dalam laporannya pada tahun 1994 mengemukakan tujuh komponen human security, yakni pengklasifikasian konsep human security dalam pengertian keamanan "bebas dari kebutuhan" (freedom from want) yang meliputi: (1) Keamanan ekonomi (economic security), (2) Keamanan pangan (food security), (3) Keamanan kesehatan (health security), (4) Keamanan lingkungan (environmental security), (5) Keamanan individu (personal security), Keamanan komunitas (community security), dan (7) Keamanan politik (political security) (Yani, dkk., 2017: 12).

Health security atau keamanan kesehatan merupakan salah satu isu keamanan yang terdapat dalam konsep human security. Secara umum, health security bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi manusia dari berbagai penyakit dan pola hidup yang tidak sehat. Kesehatan tidak hanya didefinisikan sebagai kondisi dimana tidak ada penyakit (not just the absence of disease) tapi kebutuhan yang harus dijamin oleh negara secara keseluruhan baik fisik, mental, dan kehidupan sosial yang baik, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan diri yang baik dalam proses kehidupan sosialnya. Pada mulanya, urusan kesehatan merupakan urusan domestik suatu negara. Dengan adanya globalisasi, saat ini masalah kesehatan publik juga menjadi perhatian penting bagi kebijakan luar negeri. Begitu pula sebaliknya, kebijakan luar negeri dilihat sebagai mekanisme penting untuk menjaga kesehatan global. Negara-negara Bersatu membentuk berbagai program demi menciptakan dunia yang bebas dari segala penyakit dengan menyediakan fasilitas kesehatan publik yang memadai dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dunia (Yani, dkk., 2017: 62-63).

Hubungan Sipil - Militer

Hubungan militer-sipil merupakan satu aspek dari kebijakan keamanan nasional. Agenda dari kebijakan keamanan nasional adalah meningkatkan keamanan institusi-institusi sosial dan politik bangsa terhadap berbagai ancaman yang muncul dari negara-negara merdeka lainnya.

Kebijakan keamanan nasional berada dalam tiga bentuk dan dalam dua tingkatan. Kebijakan keamanan militer meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk mengurangi atau menetralkan berbagai usaha yang akan melemahkan atau menghancurkan negara dengan menggunakan kekuatan senjata yang dioperasikan negara dengan menggunakan kekuatan senjata yang dioperasikan dari luar batas-batas institusional dan teritorialnya. Kebijakan keamanan internal berhubungan dengan ancaman subversi – usaha untuk melemahkan atau menghancurkan negara dengan berbagai kekuatan yang dioperasikan di dalam batas-batas institusional dan teritorialnya.

Kebijakan keamanan situasional menyangkut ancaman penghancuran yang diakibatkan oleh perubahan jangka panjang kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan politik yang mengurangi kekuatan negara. Masing-masing dari ketiga kebijakan itu memiliki tingkatan operasional dan tingkatan institusional. Kebijakan operasional terdiri dari tindakan yang diambil untuk menghadapi ancaman keamanan. Kebijakan institusional berhubungan dengan cara bagaimana kebijakan operasional dirumuskan dan dilaksanakan. Hubungan militer sipil merupakan komponen institusional yang mendasar dari kebijakan keamanan militer (Huntington, 2003: IX).

Sinergitas

Sinergitas merupakan upaya untuk membagi suatu tugas dengan memberikan kesempatan untuk tiap-tiap pihak saling melengkapi satu sama lain sehingga mencapai tujuan akhir atau penyelesaian tugas bersama. Sinergitas terdiri dari tiga pilar utama yaitu *sharing*, *flexibility/stability (error compensation)*, dan *task-dependence*. *Sharing* atau pembagian tugas diartikan sebagai upaya untuk dapat memberikan tiap-tiap komponen tugas dalam memproduksi atau mengerjakan suatu perintah, hal tersebut merupakan suatu bentuk diferensiasi antar berbagai pihak/sector/lembaga yang terkoordinasi dalam pencapaian tugas tertentu untuk dapat

maksimal menggunakan keahlian mereka masing-masing. *Flexibility/stability (error compensation)* atau fleksibilitas/stabilitas (melengkapi kekurangan) digambarkan sebagai upaya distribusi tugas yang tidak hanya mengharapkan keseimbangan belaka, namun sikap saling melengkapi sehingga kesalahan atau error yang dihadapi oleh satu-dua sektor tidak berdampak luas pada kerusakan sistem atau gagalnya pencapaian tujuan, pilar ini dimaksudkan bahwa sinergitas membutuhkan fleksibilitas tiap sektor yang tidak kaku dalam suatu aturan belaka, namun berhadapan pada pemahaman akan peran masing-masing dan saling melengkapi ketika dibutuhkan.

Pilar yang ketiga adalah *Task-dependence* atau ketergantungan terhadap tugas, pilar ketiga ini dimaksudkan untuk menghindari definisi sinergi yang abstrak, sehingga fokus utama suatu sinergitas adalah mencapai suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Pada pilar yang ketiga inilah digantungkan semua pencapaian ke dalam proses antar tiap aktor/lembaga/sector/institusi tanpa memperhatikan besar-kecilnya peran masing-masing selain itu kontribusi tiap aktor/lembaga/sector/institusi harus dapat terdistribusi dengan baik (Latash, 2008: 13-15).

METODE

Dalam tulisan ini, periset menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan periset menggunakan metode dan pendekatan tersebut karena periset ingin mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai sinergitas RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dalam menghadapi ancaman kesehatan. Untuk mendapatkan data yang mendalam tersebut, periset menggunakan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam terhadap sejumlah informan, observasi, dan studi dokumentasi.

Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling *purposive*, dimana periset memilih informan riset dengan pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan masalah penelitian yang dilakukan dan informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris RSAU dr. Esnawan Antariksa dan Kepala KKP Kelas 1 Soekarno-Hatta koordinator wilayah kerja Halim Perdanakusuma. Selanjutnya untuk uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teori dan untuk analisis data, penelitian

ini menggunakan teknik analisis data Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bandara, selain memberikan manfaat yang besar sebagai pintu masuk alat angkut, orang dan barang, juga dapat membawa potensi dampak negatif khususnya terkait ancaman keamanan kesehatan berupa penyebaran penyakit yang berpotensi wabah atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Dalam menghadapi permasalahan tersebut, *International Health Regulation* (IHR) 2005 mengamanatkan kepada negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk mengembangkan, memperkuat dan mempertahankan kapasitas kesehatan masyarakat nasional, agar dapat mendeteksi, menilai, melaporkan berbagai peristiwa dan merespon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai risiko dan emergensi kesehatan masyarakat. IHR 2005 mengamanatkan setiap negara mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menangkul transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia (PHEIC) (Profil Kegiatan Tahun 2016 – 2018 KKP Kelas I Soekarno-Hatta).

Ancaman keamanan kesehatan berupa penyebaran penyakit yang berpotensi wabah bisa datang dari luar atau dalam negeri dan ancaman tersebut sulit diperkirakan karena mobilisasi yang tinggi melalui pintu masuk negara salah satunya adalah bandara. Ancaman keamanan kesehatan yang mungkin masuk melalui bandara menjadi tantangan yang besar untuk Indonesia. Karena itu, upaya cegah tangkal penyakit potensial wabah di pintu gerbang negara harus terus menerus diperkuat dan ditingkatkan termasuk di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma.

Berdasarkan observasi dan studi dokumen yang peneliti lakukan, lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung pengamanan kesehatan di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta wilayah kerja Halim Perdanakusuma. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP yang merupakan revisi SK

Menkes No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008, KKP Kelas I Soekarno Hatta memiliki tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja Bandara Halim Perdanakusuma. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kekarantinaan berupa pengawasan dokumen kesehatan pesawat, pengawasan dokumen penumpang, pengawasan lalu lintas orang sakit dan jenazah dan pengawasan OMKABA impor dan ekspor.
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan P3K pesawat, pengawasan dan pengujian kesehatan kerja dan pelayanan laboratorium.
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas negara meliputi pengawasan kualitas air, udara dan tanah, pengawasan makanan dan minuman, pengawasan sanitasi gedung dan lingkungan serta pengawasan sanitasi pesawat.
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia.
- f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional.
- g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk, meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan

- rujukan, penerbitan dokumen kesehatan, vaksinasi internasional dan penerbitan ICV.
- h. Pelaksanaan, pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
 - i. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
 - j. Pelaksanaan kajian kekarantinaaan, pengendalian resiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan.
 - k. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
 - l. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP (Profil Kegiatan Tahun 2016 – 2018 KKP Kelas I Soekarno-Hatta).

Namun, selain KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma, karena Bandara Halim Perdanakusuma merupakan pangkalan militer, maka terdapat Rumah Sakit TNI Angkatan Udara yaitu RSAU dr. Esnawan Antariksa yang pada dasarnya juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pengamanan kesehatan di Bandara Halim Perdanakusuma. Berdasarkan Perkasau tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur RSPA dr. Esnawan Antariksa pasal 2, dijelaskan bahwa RSPA dr. Esnawan Antariksa sebagai pelaksana teknis Diskesau memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dukungan kesehatan yang diperlukan dalam setiap kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan Udara, baik yang diselenggarakan oleh tingkat komando/markasbesar maupun tingkat Pangkalan Udara Halim.
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anggota militer dan PNS beserta keluarga, serta melayani anggota TNI beserta keluarga.
- c. Melaksanakan uji kesehatan periodik bagi seluruh anggota militer dalam jajaran Lanud Halim dan uji kesehatan nonperiodik dalam rangka mengikuti pendidikan/penugasan, serta melaksanakan uji kesehatan dalam rangka seleksi calon tamtama, bintara,

dan perwira.

Serta pasal 3, yang menjelaskan dalam pelaksanaan tugas tersebut, RSPA dr. Esnawan Antariksa menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Promotif dan preventif yang meliputi kegiatan higienis dan sanitasi lingkungan, imunisasi, serta pendidikan kesehatan masyarakat.

- a. Kuratif dan rehabilitatif yang meliputi kegiatan pelayanan gawat darurat dan pelayanan kesehatan spesialis, baik rawat jalan maupun rawat inap.
- b. Pengungsian medik dan pertolongan pertama pada kecelakaan terbang.
- c. Penunjangan rumah sakit seperti: farmasi, dapur, gudang, dan penunjangan perawatan lainnya.
- d. Pusat diagnostik dan sebagai rumah sakit rujukan.

Dengan adanya dua lembaga kesehatan di wilayah Bandara Halim Perdanakusuma, yaitu RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma, maka diperlukan adanya sinergitas yang baik antara dua lembaga tersebut sehingga masing-masing lembaga bisa saling melengkapi satu sama lain, yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan upaya dalam menjaga negara dari ancaman keamanan kesehatan di Bandara Halim Perdanakusuma serta dapat melaksanakan amanat dari IHR 2005 yaitu mempunyai kemampuan dalam mencegah dan menangkal transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia (PHEIC). Menurut Mark L. Latash (1958: 13-15), sinergitas merupakan upaya untuk membagi suatu tugas dengan memberikan kesempatan untuk tiap-tiap pihak saling melengkapi satu sama lain sehingga mencapai tujuan akhir atau penyelesaian tugas bersama.

Sinergitas terdiri dari tiga pilar yaitu sharing, flexibility/stability (error compensation), dan task-dependence.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma pada dasarnya telah melaksanakan sinergitas, namun sinergitas tersebut belum dilaksanakan dengan optimal.

Sinergitas yang terjadi antara RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dapat dilihat dari adanya pembagian tugas pada saat ada pengiriman anggota TNI untuk melaksanakan misi PBB ke luar negeri, dimana anggota TNI tersebut akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa sementara diberikan imunisasi di KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma. Termasuk juga apabila ada Anggota TNI yang pulang sehabis melaksanakan misi PBB di luar negeri, kepada anggota TNI tersebut akan dilakukan screening (bio security) oleh KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dan untuk kekarantinaan pengawasan kesehatan dilakukan oleh RSAU dr. Esnawan Antariksa. Sampai dengan saat ini sinergitas antara RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma hanya dilaksanakan pada pembagian tugas tersebut, sementara untuk sinergitas dalam hal pemeriksaan pada sipil, baik penerbangan komersial atau charter masih belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti, seharusnya RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma bisa melaksanakan sinergitas lebih dari itu, sehingga apa yang menjadi mandat dari IHR 2005 bisa dilaksanakan dengan optimal. Bahkan dengan adanya sinergitas yang baik selain melaksanakan mandat dari IHR 2005, RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma juga dapat mendukung pelaksanaan program Global Health Security Agenda (GHSa) yang merupakan wadah untuk melindungi kepentingan negara untuk mengendalikan persebaran penyakit, khususnya penyakit yang berpotensi masuk ke dalam Public Health Emergency International Concerns (PHEIC).

Berkaitan dengan GHSa, RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dapat melaksanakan sinergitas untuk melaksanakan Action Packages and Commitment GHSa yang terdiri dari:

1. Penanggulangan Anti Microbial Resistance (AMR).
2. Pengendalian penyakit Zoonotik.
3. *Biosafety* dan *Biosecurity*.
4. Imunisasi. Penguatan Sistem Laboratorium Nasional.
5. Surveilans.

6. Pelaporan.
7. Penguatan SDM
8. Penguatan pusat penanganan kegawatdaruratan.
9. Kerangka hukum dan respons cepat multisektoral.
10. Mobilisasi bantuan dan tenaga medis

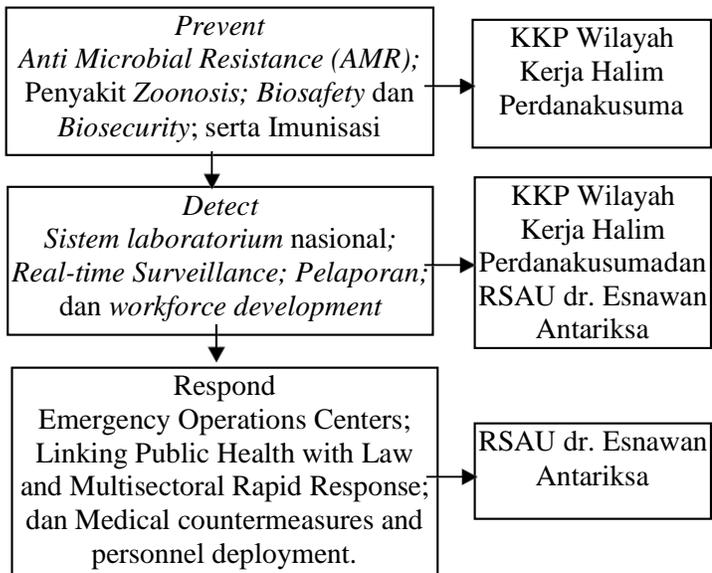
Action Packages and Commitment GHSa tersebut apabila dibagi ke dalam pendekatan Prevent, Detect, & Response maka akan seperti bagan sebagai berikut⁷ :

Bagan 1
Pembagian Action Packages and Commitment GHSa dalam Pendekatan Prevent, Detect, & Response

<i>Prevent</i>	<i>Anti Microbial Resistance (AMR); Penyakit Zoonosis; Biosafety dan Biosecurity; serta Imunisasi</i>
<i>Detect</i>	<i>Sistem laboratorium nasional; Real-time Surveillance; Pelaporan; dan workforce development</i>
<i>Respond</i>	<i>Emergency Operations Centers; Linking Public Health with Law and Multisectoral Rapid Response; dan Medical countermeasures and personnel deployment.</i>

Selanjutnya sinergitas dalam melaksanakan Action Packages and Commitment GHSa antara RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dapat dibagi pada bagan 1 sebagai berikut:

Bagan 1
Pembagian Action Packages and Commitment
GHSA RSAU dr. Esnawan Antariksa dan
KKP Wilayah Kerja Halim Perdanakusuma



Selain meningkatkan sinergitas, agar pelaksanaan Action Packages and Commitment GHSA dalam upaya menjaga keamanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan optimal, RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma harus meningkatkan kemampuannya baik dalam bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta piranti lunak. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini dapat dikatakan RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma masih belum memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman keamanan kesehatan bila terjadi ancaman kesehatan di Bandara Halim Perdanakusuma. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Sumandyasa(2018), dimana melalui penelitiannya menunjukkan bahwa RSPAU dr. S. Hardjolukito belum memiliki kesiapan pada penanganan bioterrorisme. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Manaseh dkk, (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa departemen kesehatan di Bandara Internasional Jomo Kenyatta pada dasarnya telah memiliki tenaga kesehatan, fasilitas, serta peralatan yang diperlukan untuk memeriksa penyakit Ebola, namun masih memiliki kekurangan pada beberapa bagian seperti salah satunya pada fasilitas lab yang masih kurang memadai.

Selain meningkatkan kualitas SDM serta sarana prasarana yang dapat mendukung penanggulangan ancaman kesehatan di Bandara

Halim Perdanakusuma, satu hal yang sangat penting adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran baik lembaga pemerintah atau masyarakat mengenai ancaman keamanan kesehatan karena sampai dengan saat ini kesadaran semua pihak akan ancaman keamanan kesehatan dapat dikatakan masih rendah. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara pertama, melaksanakan sosialisasi tentang PHEIC dan GHSA secara berkala kepada semua segmen masyarakat. Kedua, KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dapat berinisiatif untuk membentuk forum bandara sehat sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama insan penerbangan terhadap arti pentingnya kesehatan serta bahaya ancaman kesehatan. Ketiga, melaksanakan simulasi penanggulangan wabah penyakit di Bandara Halim Perdanakusuma secara berkala sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan semua pihak dalam menghadapi ancaman kesehatan.

Sampai dengan saat ini mungkin masih belum ada kejadian ancaman keamanan kesehatan khususnya di Bandara Halim Perdanakusuma, umumnya di bandara-bandara di Indonesia. Namun pemerintah atau instansi yang berwenang sudah seharusnya memikirkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, dan langkah tersebut akan dapat dilaksanakan dengan optimal apabila terjalinnya sinergitas antara seluruh lembaga terkait atau multi sektoral. Dengan adanya sinergitas antar instansi yang berwenang maka akan terjadi pembagian peran dan tiap-tiap pihak akan saling melengkapi satu sama lain sehingga mencapai tujuan akhir atau penyelesaian tugas bersama dan sinergitas tersebut dapat dilakukan dalam skala nasional atau internasional seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 Sinergitas Antar Sektoral

Sumber: Audiensi Menteri Kesehatan dengan Kepala KKP seluruh Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset, periset menyimpulkan bahwa sinergitas RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dalam menghadapi ancaman kesehatan sudah terjalin namun belum optimal. Sinergitas yang terjadi antara KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma dan RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat dilihat dari adanya pembagian tugas pada saat ada pengiriman anggota TNI untuk melaksanakan misi PBB ke luar negeri dan sampai dengan saat ini sinergitas yang dilaksanakan hanya pada pembagian tugas tersebut.

Sementara untuk sinergitas dalam hal pemeriksaan pada sipil, baik penerbangan komersial atau *charter* masih belum terlaksana dengan baik karena sampai dengan saat ini koordinasi antara RSAU dr. Esnawan Antariksa dan KKP wilayah kerja Halim Perdanakusuma masih belum optimal khususnya dalam hal ancaman kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil riset, rekomendasi yang dapat diusulkan dari riset ini diantaranya adalah bagi periset selanjutnya, jika ingin meriset hal yang serupa sebaiknya mengkaji tentang kesiapan dari bandara dan institusi yang mendukung operasional bandara dalam menghadapi ancaman kesehatan serta meneliti tentang implementasi GHSA oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan *leading* sektor dalam bidang kesehatan termasuk dalam permasalahan ancaman kesehatan dan rekomendasi bagi pemerintah, sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kesiapan di pintu masuk negara dalam upaya menghadapi ancaman kesehatan, membentuk forum bandara sehat, meningkatkan kesadaran baik lembaga pemerintah atau masyarakat mengenai ancaman keamanan kesehatan, melaksanakan sosialisasi tentang PHEIC dan GHSA secara berkala, serta melaksanakan simulasi penanggulangan wabah penyakit di pintu masuk negara secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Manaseh, B., Yeri, K., & Joseph, G. (2016). An Investigation into the Existing Capacity and Screening Procedures for Ebola at Jomo Kenyatta International Airport, Nairobi. *International journal of scientific research in science, engineering and technology*, 2, 444-451.

- Darmono, B. (2010). Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 15(1), 1-41. <https://doi.org/10.22146/jkn.22307>.
- Huntington, S.P. (2003). *Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Militer Sipil*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Latash, M. L. (2008). *Neurophysiological Basis Of Movement*. 2nd Edition. New York: University Press.
- Perkasau. (2011). *Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur RSPAU dr. Esnawan Antariksa, RSAU dr. Moh. Salamun, dan RSAU dr. S. Hardjolukito*.
- Sumandyasa, W.I. (2018). *Upaya TNI AU dalam Mencegah Bioterrorisme: Studi pada RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito*.
- Yani, Y.M., Ian, M., Emil, M. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

Sumber Lain:

- Profil Kegiatan Tahun 2016 – 2018 KKP Kelas I Soekarno-Hatta.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.
- Bahan Audiensi Menteri Kesehatan dengan Kepala KKP seluruh Indonesia Jakarta, 11 Februari 2016
- <http://www.depkes.go.id/article/view/18110500007/bersama-hadapi-ancaman-keamanan-kesehatan-global.html>.
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190121143948-255-362487/waspada-10-ancaman-kesehatan-global>.
- <https://www.beritasatu.com/kesehatan/62353/3-bandara-di-as-yang-paling-rawan-menjadi-jalur-penyebaran-penyakitl>.
- <https://www.ingentaconnect.com/content/asp/asl/2018/00000024/00000009/art00135;jsessionid=11f3jd0jbb8gg.x-ic-live-03>.
- <http://theconversation.com/indonesia-dan-ancaman-bioterrorisme-antraks-beberapa-hal-yang-perlu-diketahui-agar-bisa-mencegahnya-117677>.
- https://www.who.int/influenza_vaccines_plan/obj

ectives/SLPIVPP_Session3_Kerr.pdf.
http://www.laraspostonline.com/2016/02/menjaga-wibawa-lanud-halim-sebagai_29.html.